

Catatan Diseminasi CSOSI 2023

5 Agustus 2024/Zoom Cloud/10.05 - 12.44 WIB

1. Lusi Herlina

- Konsil sudah melaksanakan penyusunan indeks keberlanjutan LSM sejak 2015
- Tahun 2022, dukungan FHI36- untuk pelaksanaan ini terhenti.
- Penyusunan indeks keberlanjutan tahun 2023 bersama Perkumpulan Lokadaya dan Yayasan Penabulu.
- CSOSI ini menilai dan menggambarkan perkembangan kondisi CSO di Indonesia secara internal maupun eksternal
- Yang menarik dari laporan ini: Dari sisi dimensi hukum ternyata menurun dari tahun sebelumnya dan kita dapat melihat resiliensi OMS dengan situasi itu tapi dari sisi advokasi ada peningkatan.

2. Misran Lubis

- Ada yang berbeda dalam penilaian CSOSI ke-9 ini. Timnya semuanya dari Indonesia sedangkan sebelumnya melibatkan pihak luar, seperti FH360.
- Proses dari riset awal hingga CSOSI terbit memakan waktu sekitar 5-6 bulan.
- Untuk memastikan OMS di satu negara demokrasi tetap eksis dan bergerak itu tidak hanya peran dari OMS sendiri tapi juga elemen lain di negara tersebut, terutama pemerintah untuk memastikan OMS itu terus ada dan sustain. Tidak hanya soal finansial tapi juga dari ruang gerak.
- Isu masyarakat sipil juga merupakan bagian dari isu pemerintah karena bagian dari pilar demokrasi.

3. Anick HT

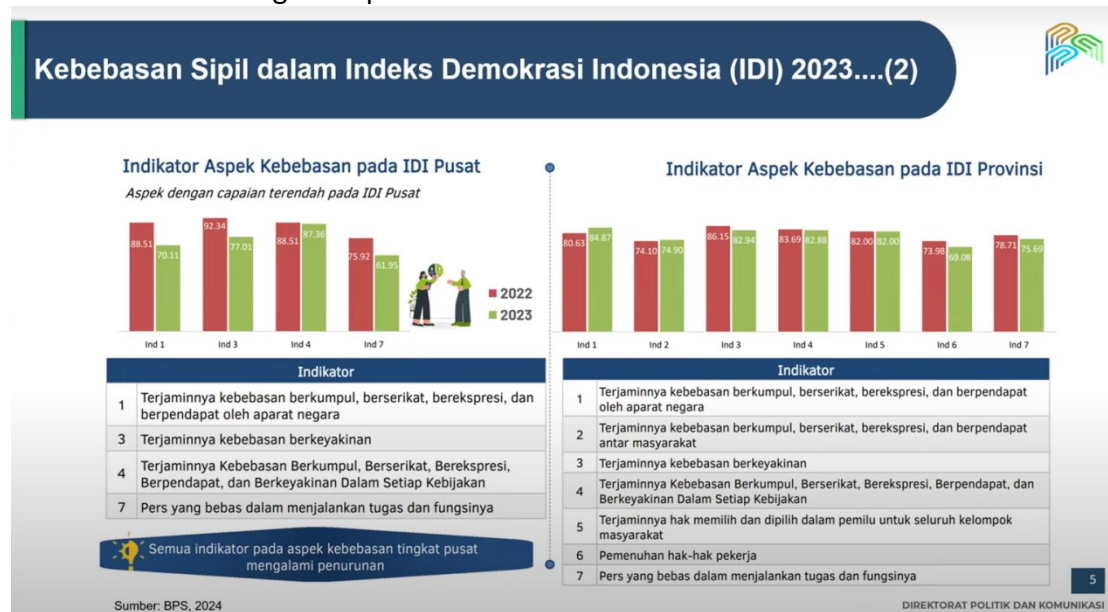
- Paparan Hasil Survei CSOSI: Resiliensi OMS di tengah penyempitan ruang sipil
- Yang kita lakukan berbeda dengan 70-80 negara lain. Kita sudah izin ke FH360 untuk meneruskan CSOSI ini dengan dukungan pihak lain (didukung European Union melalui Program Co Evolve 2).
- CSOSI dikembangkan pertama kali oleh United States Agency for International Development Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance Center for Excellence on Democracy, Human Rights and Governance
- Pada 2023, Konsil kerja sama dengan Infid melakukan survei eksistensi dan kapasitas OMS dan mendapatkan 509 responden OMS dari seluruh Indonesia.
- Namun, representasi kita masih kurang proporsional karena tidak mendapat data yang cukup dari Kemenkumham.
- Yang paling penting, survei CSOSI ini melibatkan 10 panel ahli yang dianggap representatif dengan bidangnya, termasuk representatif dari pemerintah.
- Yang dinilai ada 7 dimensi dengan 36 subdimensi
- Temuan 2023: Dimensi Lingkungan Hukum menurun dan dimensi advokasi serta penyedia layanan meningkat.
- Hasil ngobrol dengan kawan-kawan Bappenas, kami melihat ada masalah penting di pemerintah nasional maupun daerah: Bappenas relatif *clear* dalam melihat demokrasi substansial tapi pada praktiknya proses perencanaan itu dapat hambatan/menabrak beberapa tembok yang agak berbeda dengan

pemerintah lain dalam melihat peran masyarakat sipil. Ini menjadi tantangan OMS dan Bappenas sendiri. Apalagi tembok di pemda jauh lebih tinggi, terutama soal pendanaan.

- Konsil sedang mendampingi *social contracting* di 20 kota, untuk pendanaan swakelola tipe 3. Porsinya sangat kecil dibanding pengadaan barang dan jasa yang lain. Komitmen pemerintah terlihat sektoral.
- Kapasitas internal OMS memang belum siap menghadapi tantangan eksternal yang sebenarnya saat ini bisa dikatakan ekstrem. Jangankan bicara soal internal dan eksternal, untuk bertahan hidup saja masih menjadi masalah.
- CSOSI menjadi titik penting tapi itu tidak cukup untuk memotret, terutama persepsi publik terhadap OMS secara keseluruhan.
- Saat ini Konsil sedang melakukan pembicaraan dengan Penabulu untuk menggarishabawahi yang selama ini dilakukan Edelman tentang persepsi publik terhadap OMS.
- Peletakkan istilah organisasi masyarakat sipil oleh pemerintah masih dalam satu keranjang, yaitu ormas. Mau bagaimana pun bentuknya, selama itu bukan milik pemerintah, itu adalah ormas. Ini menjadi tantangan juga dalam konteks nomenklatur hukum nasional.
- Tahun depan kita akan mulai melihat secara detail persepsi publik secara nasional dan membandingkannya dengan elemen-elemen lain, dan hasil Edelman yang terlalu general.

4. Bappenas_Rani


- Apresiasi Konsil dan semua pihak yang terlibat dalam Survei CSOSI ini
- Penyempitan ruang sipil sudah tercatat dalam capaian indeks demokrasi Indonesia 2023. Hasilnya, sejalan/satu suara dengan hasil CSOSI. Aspek kebebasan mengalami penurunan terbesar.



- Kebebasan sipil berdasar Freedom in THE World 2024, Indonesia mengalami sedikit pelambatan kinerja demokrasi.
- Arah kebijakan terkait masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan nasional ada di RPJPN 2025 - 2045.

- Terkait masyarakat sipil ada di agenda Pembangunan 9 (IE9/Indonesia Emas ke-9): Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, IE10: Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial.

Arah Kebijakan terkait Masyarakat Sipil Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 (Juli 2024)



IE9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tantangan

Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik seperti masih banyak kader yang mengalami permasalahan hukum, melanggar standar etik, serta sulitnya mencari calon pemimpin dan calon anggota legislatif. Selanjutnya, pengelolaan keuangan partai politik belum transparan dan belum akuntabel serta pendanaan dari negara belum memadai, sehingga berdampak pada maraknya praktik politik uang, perilaku koruptif, dan ketidakmandirian partai politik.

Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil.

Sasaran


Menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Arah Kebijakan (Terkait Politik)

- Penguatan integritas partai politik melalui penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang optimal, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pendanaan yang memadai.
- Penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) masyarakat sipil melalui penguatan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil.

9
DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI

Arah Kebijakan terkait Masyarakat Sipil Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 (Juli 2024)



IE10: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Tantangan

Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Hal ini berakibat pada terjadinya politik uang, kurangnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi penggunaan dana publik, belum optimalnya sistem pemilu dan kemerdekaan pers; **serta kurangnya kebebasan sipil**, meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi. **Sementara itu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.**

Sasaran

Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak.

Arah Kebijakan

- Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu seperti melakukan kodifikasi UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peran partai politik yang akuntabel melalui revisi UU Partai Politik, lembaga perwakilan yang responsif, serta media dan pers yang berkualitas;
- Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat;
- Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- Penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas;
- Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat;
- Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

10
DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI

- RPJPN ini sedng menunggu penetapan dan akan ditetapkan dengan UU.
- RPJMN 2025 2029: Ada rancangan teknokratik

Arah Kebijakan terkait Masyarakat Sipil Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029



Agenda Pembangunan: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Tantangan

Dalam bidang demokrasi, **belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil**, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan konstitusionalisme yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan.

Arah Kebijakan

1. Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum, dan Keamanan Nasional melalui pembentukan Dewan Keamanan Nasional; transformasi kelembagaan demokrasi; internalisasi Ideologi Pancasila dan Konstitusi; transformasi kelembagaan dan tata kelola keamanan laut berdasarkan regulasi tunggal; serta transformasi kelembagaan dan tata kelola keamanan siber.
2. **Penguatan Kebebasan Sipil dan Kesetaraan** melalui **penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat**; serta **penguatan kesetaraan masyarakat pada sektor politik, sosial, dan ekonomi**.
3. **Komunikasi Publik** melalui **penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik**; dan pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri.

11

DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI

- Prioritas Nasional RKP 2025 yang sudah disesuaikan dengan Presiden Terpilih: terkait masyarakat sipil masuk ke Prioritas Nasional 1 (memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia).

Intervensi Kebijakan Prioritas Nasional 1 RKP 2025



1. Memperkokoh ideologi Pancasila dilaksanakan melalui (a) internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan; serta (b) aktualisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dengan pendekatan pengarusutamaan ideologi Pancasila sejak dini, berkesinambungan, dan berbasiskan ramah pengguna (*user friendly*).
2. **Penguatan demokrasi** dilaksanakan melalui (a) **penguatan kebebasan dan kesetaraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan penguatan lingkungan pendukung masyarakat sipil**, serta **penguatan kesetaraan masyarakat pada sektor politik**; dan (b) penguatan lembaga demokrasi.
3. **Pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik** dilaksanakan melalui (a) **penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik**; serta (b) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri (BEJO'S), melalui penguatan kapasitas lembaga dan insan pers yang dibarengi mewujudkan iklim penyehatan media arus utama.
4. Kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dilaksanakan melalui (a) peningkatan kualitas kader pemimpin di tingkat pusat hingga daerah; serta (b) peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda.
5. Transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia dilaksanakan melalui (a) transformasi pengarusutamaan hak asasi manusia; serta (b) transformasi layanan akses terhadap keadilan yang substansial terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

13

DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI

- Catatan



- OMS memiliki **peran strategis** dalam pembangunan dan demokrasi, yaitu sebagai pelaku **pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, dan kontrol sosial**. Agar OMS dapat melaksanakan perannya secara optimal, maka **penguatan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan, dan lingkungan pendukung** masyarakat sipil menjadi hal yang penting.
- Upaya **menguatkan kebebasan dan kesetaraan** terus dilakukan oleh Pemerintah melalui arah kebijakan dan strategi yang nantinya akan diturunkan pada program dan kegiatan Kementerian/Lembaga terkait. Dengan demikian, masyarakat sipil dapat **berpartisipasi secara lebih aktif dan bermakna** dalam **tiap tahapan pembangunan**.
- Kami berharap **OMS terus konsisten** dalam **melaksanakan perannya, meningkatkan kapasitas organisasi**, serta **tetap menjalin kerjasama dan berkolaborasi**, baik **antar OMS**, maupun dengan **pemerintah atau swasta**.
- Terkait Indeks Keberlanjutan OMS (CSOSI), harapan kami, agar **pengukuran indeks** tersebut terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Kami juga berharap **hasil pengukuran lebih cepat** selesai (misal di triwulan I atau II) sehingga hasil indeks (tahun T) dapat menjadi masukan ataupun mempertajam program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T+2.

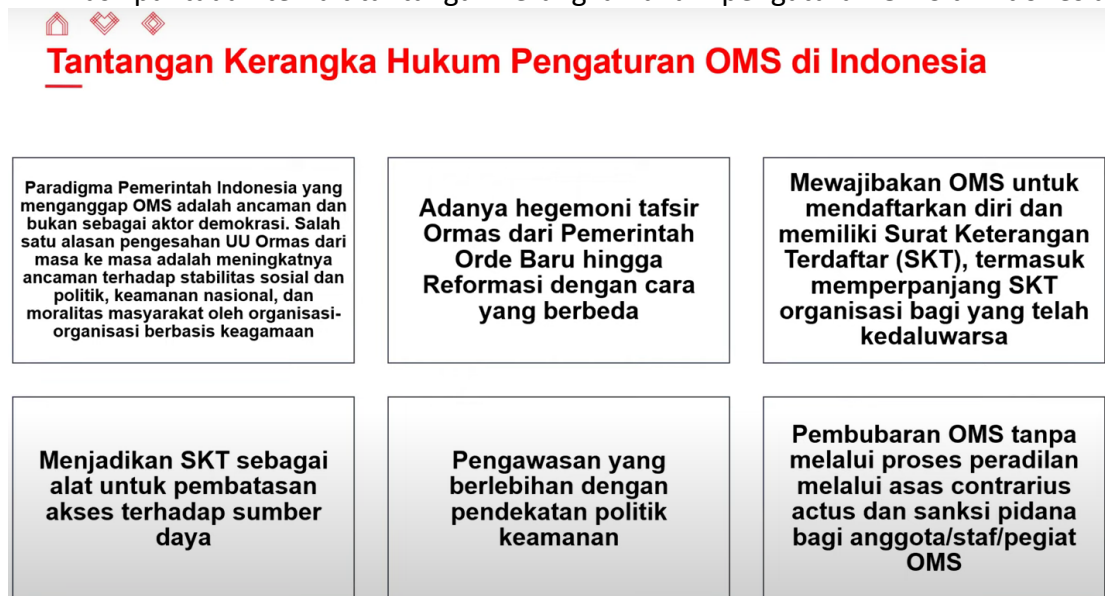
- **Terikat pengukuran indeks keberlanjutan OMS ini diharapkan bisa terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dan pengukurannya bisa lebih cepat selesai. Misalnya, di Triwulan I atau II di Mei/Juni sehingga hasilnya dapat menjadi masukkan/mempertajam rencana kerja pemerintah.**

5. Riza Imaddudin

- Indeks keberlanjutan OMS dilihat dengan konsep resiliensi OMS dari CIVICUS: berbagai faktor penyempitan ruang sipil + kerentanan kapasitas internal OMS untuk menjalankan perannya.
- Civicus lebih angkat ke ruang sipilnya.
- Ada lima dimensi yang angkat internal OMS dan dua dimensi angkat eksternal OMS (Lingkungan Hukum dan Citra Publik).
- Secara internal OMS, yang sering dikeluhkan itu terputus hubungan OMS dengan komunitas atau konstituennya/penerima manfaatnya. Ini jadi tantangan internal tersendiri.
- Internal OMS belum cukup banyak menaruh perhatian pada mengkomunikasikan dampak positif atau praktik baik dari kerja-kerja yang sudah dilakukan, terutama ke generasi sekarang. Ini menunjukkan ada kepemimpinan yang kurang adaptif untuk menjembatani antar generasi.
- Masalah lain: regenerasi internal/kader OMS.
- Secara eksternal, masalah OMS di antaranya: tekanan yang meningkat pada media untuk membatasi kritik, pengawasan berlebihan untuk akses pendanaan, cyber troops/buzzer/influencer yang dikuasai elit politik dan ekonomi.
- Hal menarik lainnya: media yang dikooptasi oleh oligarki. Ini jadi kendala juga bagi OMS. OMS yang berusaha untuk memanfaatkan publikasi media tapi di sisi lain, media juga ditekan pemerintah untuk membatasinya.



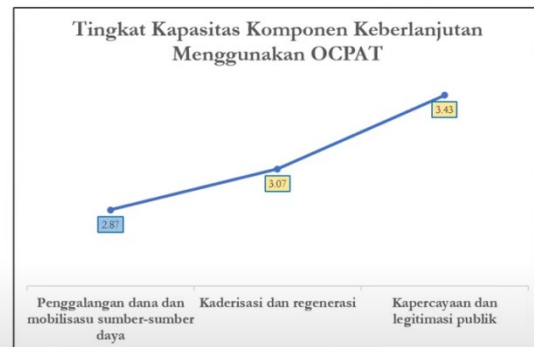
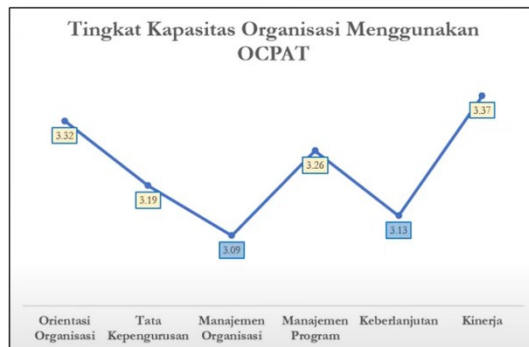
- Hasil pantauan terkait tantangan kerangka hukum pengaturan OMS di Indonesia



- Dalam konteks KKB, tafsir terhadap ormas itu bermasalah. Pemerintah Indonesia menganggap OMS adalah ancaman dan bukan aktor demokrasi. Sulit untuk keluar tafsir ini karena hampir dalam semua kebijakan menggunakan tafsir bermasalah itu.
- Status kapasitas OMS dengan alat/instrumen/tools OCPAT yang dikembangkan Yappika (ada 6 dimensi). Yang paling rendah itu ada di manajemen organisasi dan keberlanjutan.
- Tingkat kapasitas komponen keberlanjutan OMS menggunakan OCPAT (ada 3 dimensi). yang paling rendah ada di penggalangan dana dan mobilisasi sumber-sumber daya dan kaderisasi.



Status Kapasitas OMS



- Dari sudut pandang Yappika dan aliansi filantropi Indonesia, penggalangan dan apublik juga memiliki problem.
- Resiliensi OMS tidak hanya soal keberlanjutan OMS nya sendiri tapi juga ketika konstituennya juga resilien. Ketika OMSnya resilien, OMSnya juga harus memikirkan gerakan masyarakatnya/konstituennya juga bisa resilien.
- Ada 4 faktor pendukung resiliensi gerakan masyarakat sipil:

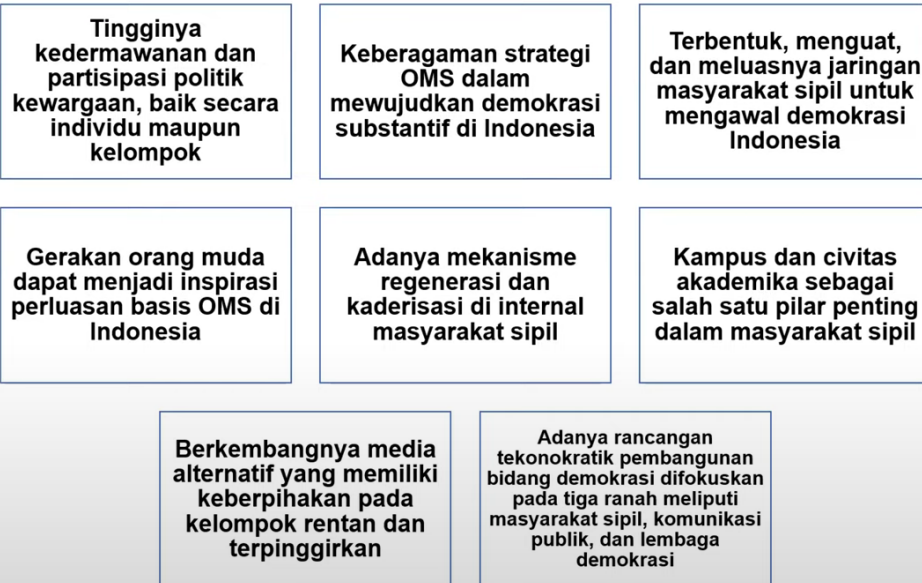


Faktor Pendukung Resiliensi Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia

- **Adanya perasaan senasib, termasuk memperkuat dan memperluas jaringan masyarakat sipil lokal, nasional, dan regional.** Isu-isu publik yang menjadi diskursus memperlihatkan bahwa hal-hal yang sangat dekat dengan masyarakat dapat menciptakan pengalaman langsung dan kesadaran subjektif atas adanya realitas ancaman dalam bentuk penindasan atau ketidakadilan.
 - **Cara penyampaian dan medium.** Pengemasan isu secara ringan dan medium yang intensif sangat penting dalam proses perluasan gerakan masyarakat sipil. Kedua unsur yang tidak terpisahkan ini berperan dalam mempercepat adanya *"the mild voice of reason"*, dimana masyarakat sipil mendapatkan perspektif yang masuk akal terhadap suatu situasi yang mengancam.
 - **Inklusivitas dan kolektivisme, termasuk mengoptimalkan peran orang muda dalam gerakan masyarakat sipil.** Pendekatan yang lebih mengarah pada interseksionalitas dengan latar belakang keberagaman lebih dapat membuka peluang diterima oleh masyarakat dengan tetap membawa misi-misi aktivisme dalam membela hak asasi manusia, demokrasi, dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat sipil.
 - **Pembagian peran dalam gerakan masyarakat sipil, termasuk kepemimpinan strategis dalam masyarakat sipil.** Faktor lain yang mendukung resiliensi gerakan masyarakat sipil adalah adanya pembagian peran dalam gerakan (*self-organizing civil society*).
- Potensi memperkuat ekosistem masyarakat sipil Indonesia (dalam hal ini resiliensi):



Potensi Memperkuat Ekosistem Masyarakat Sipil Indonesia



Agenda ke Depan: Memperkuat Ekosistem Masyarakat Sipil Indonesia



- o Memberi perhatian lebih besar untuk menguatkan berbagai kapasitas internal OMS:
 - Perlu strategi lebih inovatif dengan menggunakan ekosistem masyarakat sipil
 - Alokasi pendanaan → Institusi donor perlu memberikan alokasi khusus untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, bukan hanya teknikal program, termasuk dalam memperkuat ekosistem masyarakat sipil.
 - Menumbuhkan dan menguatkan infrastruktur sektoral (*supporting infrastruktur*) → *grant intermediaries*, penyedia kapasitas, penyedia pengetahuan/riset, penyedia bantuan hukum, dan penyedia konseling.
- o Memperkuat dan memperluas jaringan masyarakat sipil untuk memperbaiki kebijakan yang lebih kondusif bagi ruang sipil dan masyarakat sipil Indonesia

6. Budi Susilo: Refleksi perjalanan organisasi dan demokrasi di Indonesia

- Konteks *civic space*. Aktornya pemerintah dan warga negara. Arena *civic space* itu adalah arena yang dilindungi, yakni kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi/berserikat, kebebasan berekspresi.
- Hukum terkait korupsi melemah, ada kemandekan terkait perlindungan terhadap hak-hak minoritas.
- Ketika demokrasi mandek, ada pihak yang ingin memajukan/memperbaiki dan ada pihak yang membalikkan/mengembalikan/mendorong ke arah mundur.
- Pertanyaan resiliensi menjadi hal yang penting untuk dilihat dan didorong.
- Untuk melajukan kerja-kerja *civic space*, Penabulu melihat ada 3 hal yang perlu dikerjakan. Pertama, membangun *knowledge hub*. Bagaimana merancang siklus pengetahuan dengan memantau ruang publik. Kedua, advokasi kebijakan. Ke

depan perlu diperkuat memfasilitasi kerja advokasi kebijakan. Ketiga, *raise the voice*. Menyuarakan hak-hak sipil, terutama kelompok-kelompok rentan.

- Mengutip Tan Malaka: yang utama bukanlah bentuk, melainkan isi (resiliensi).
- Penabulu mengambil peran sebagai Organisasi Sumber Daya Masyarakat Sipil (Civil Society Resource Organization/CSO) untuk pemberdayaan dan keberlanjutan masyarakat sipil Indonesia.
- Melalui CSRO, Penabulu bekerja untuk memobilisasi dan mendistribusikan sumber daya, berperan sebagai pusat kolaborasi untuk inisiatif kolektif, menempatkan investasi untuk pengembangan berkelanjutan produk layanan dan instrumen penting yang diperlukan untuk memperkuat ekosistem ruang sipil, dan berkomitmen untuk menjadi “sandbox” untuk inovasi dan eksperimen baru untuk menemukan solusi lokal yang terbaik.
- Angka penting tapi fokus utama kita adalah bagaimana kita tetap memonitor untuk relevan dan adaptif, tetap bermakna dan kolaborasinya juga semakin kuat.

Pertanyaan via chat:

1. Diana_BITRA:

Akhir-akhir ini jika kami membangun komunikasi dengan donor maka yang lebih ditekankan adalah fundraising, co-funding project, dll. Belum lagi *legal due dilligent* yang sangat diperketat. Pertanyaannya: ke depan mau ke mana arah donor di Indonesia?

Respons

Lina Herlina

- Setuju dengan beberapa resiliensi di lingkup internal dan eksternal OMS yang dikemukakan Riza, namun selain itu, pengaturan diri sendiri/*self regulation* (salah satu dimensi yang dinilai dalam dimensi no. 7: Citra Publik) *juga* menjadi tantangan pada komunitas OMS. Ada banyak kebijakan/aturan internal, misalnya: AD/ART, *safeguarding policy*, kode etik, SOP dll. Namun, praktiknya banyak yang tidak dijalankan secara konsisten. Selain itu praktik *check and balance* banyak yang tidak berjalan sehingga keseimbangan kewenangan dan kontrol sering tidak berjalan dari Dewan Pengurus (*governing board*) kepada Badan Pelaksana. Fenomena Dewan Pengurus tidak berfungsi ini umum terjadi di Indonesia. Lemahnya regenerasi kepemimpinan sebagaimana dikemukakan Riza, selain karena lemahnya sistem SDM, juga karena tidak berfungsinya Dewan Pengurus (*governing board*) yang berwenang dalam menegakkan prinsip-prinsip *governance* yang baik, terutama prinsip akuntabilitas.
- Media banyak mereduksi kerja-kerja NGO tapi kita juga harus melihat ke dalam diri NGO
- Kita perlu refleksikan problem dalam diri kita sendiri (NGO)
- Regenerasi sulit justru di lembaga dengan SDM yang memadai, seperti yayasan, kecuali di jaringan karena pengawasan ketat. Ini jadi pertanyaan penting yang perlu diperhatikan. Kalau di NGO yang SDMnya belum memadai, kepemimpinannya ganti-ganti terus.

- Dewan pengurus di OMS justru tidak berjalan sesuai kewenangannya (kinerja eksekutif, evaluasi keuangan, penegakan AD/ART dan perilaku tetapi malah hanya menjadi narasumber, fasilitator, peneliti. Ini menjadi tantangan yang juga harus diatasi.

Budi

- Pada 2009, ada Jakarta Commitment di mana pemerintah bertemu dengan 22 donor. Pertemuan ini menyepakati bahwa mitra pembangunan akan menyelaraskan program-program mereka dengan program-program pemerintah dengan menggunakan format laporan pemerintah dan mengadopsi sistem keuangan dan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah.
- Jakarta Commitment ini merupakan turunan dari Deklarasi Paris 2005 di mana tetap mengembalikan pemerintah sebagai mitra pembangunan, di mana donor harus bekerjasama dengan pemerintah.
- Kita seharusnya sadar bahwa sejak itulah pergeseran dimulai. Resiliensi mulai-mulai muncul di tahun-tahun itu, 2010, 2014 hingga sekarang.
- Kemampuan kita untuk mengantisipasi dan merefleksikan sebagai organisasi pembelajar itu penting. Ketika ada komitmen-komitmen semacam itu misalnya, itu menjadi hal yang harus kita lihat dan antisipasi dari proses-prosesnya. Tidak ada jalan lain, satu-satunya kekuatan OMS dalam antisipasi dampak tersebut adalah kita harus berkolaborasi, membangun pengetahuan bersama-sama, berjejaring secara global, dll.
- Keberlanjutan ada di tangan kita. Resiliensi tidak bisa dilakukan satu organisasi saja.

Riza

- Citra publik OMS memang rumit. Ini disebabkan dua hal. Pertama, karena direproduksi terus-menerus oleh pemerintah melalui pernyataan, kebijakan. Kedua, masalah internal OMS yang belum memadai dalam mengomunikasikan kerja-kerja dan dampak-dampak baiknya.
- Terkait akses dana, logika *co-creation*-nya pemerintah: pendekatan pemerintah cenderung kontrol dan kemandirian.
- Pemerintah perlu menyediakan sumber dana bagi keberlanjutan OMS. Penting untuk menjamin akses yang setara bagi masyarakat sipil. Di sisi OMS, perlu ada peningkatan kapasitasnya bukan *technical program*. Perlu juga akuntabilitas dan transparansi.
- Sulit untuk mendorong donor percaya pada OMS lokal/daerah tanpa melalui OMS nasional dulu.

Holan Tobing_Yayasan Embun Pelangi

- Setuju. Internal lembaga juga harus melakukan regenerasi. Kesannya hanya untuk pelengkap struktur di SK.

Valentina S. Wijiyanti_Forum JSTT

- Penegakan tata kelola OMS yang transparan dan akuntabel pun membutuhkan kemauan politik para pegiat OMS menjunjung kepentingan publik dengan dasar

prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, bukan malah memupuk mempertahankan status quo untuk kepentingan diri atau kelompok.

2. Veryanto Sitohang:

Kebijakan donor yang masuk melalui K/L apakah akan melemahkan atau memperkuat OMS? Bagaimana independensi OMS dan penguatan masyarakat sipil?

Respons:

Rudi Nainggolan

- Masyarakat sipil ideal akan tercapai bila trias politika dan konsekuensi demokrasi menyertainya bisa tercapai maksimal. Bila seksdar kebebasan berpendapat tidak signifikan mengukur tingkat perolehan ekosistem masyarakat sipil. Kondisi kebebasan berpendapat saat ini mendapatkan diri bak “anjing menggonggong kafilah berlalu”.

Rani_Bappenas

- Kapasitas/SDM internal OMS menjadi sangat penting sekaligus menjadi model untuk mendapatkan kepercayaan publik/faktor eksternal.
- Pemerintah sudah coba melakukan program terkait tata kelola organisasi kemasyarakatan (ormas) walaupun masih terbatas, yaitu untuk 2000 orang. Ini bisa dimanfaatkan oleh OMS.
- Terkait dengan ekosistem yang lain/lingkungan pendukung yang lain, kami akui memang ada perbedaan perspektif. Ini juga tantangan kami agar perencanaan ini bisa direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. Kami butuh masukan dan saran dari kawan-kawan OMS.

PENUTUP

Misran Lubis

- Paparan indeks hari ini menggambarkan bagaimana kondisi OMS pada 2023
- Masyarakat sipil secara substansial adalah pilar demokrasi, bukan ancaman terhadap demokrasi maupun terhadap negara.
- Penting bagi OMS untuk melihat internalnya seperti apa, seperti ruang tata kelolanya, akuntabilitasnya, dll.
- Di samping tekanan dari negara, kita juga perlu terbuka dan menikmati proses dalam mengikuti peluang-peluang yang dibuka oleh negara, seperti dana bantuan hukum, SW3, dana pembinaan OMS.
- OMS memang masih banyak yang abal-abal tapi banyak juga yang berintegritas. Integritas itu harus terus dijaga.
- Konsil banyak melakukan survei tentang masyarakat sipil/OMS. Silakan, berkontak dengan dengan Mas Anick dan kunjungi laman Konsil terkait hal ini.

Sarwitri

- Pengingat: resiliensi itu berdaya lenting atau seperti bola jatuh yang memantul lagi, bagaimana mantulnya itu bisa diantisipasi.